



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
Jl. Pramuka No. 33 Jakarta 13120
Telepon / Faksimili 021-8563614
E-mail : dki@bpkp.go.id

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bonny Anang Dwiyanto
Jabatan : Kepala Perwakilan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mardiasmo
Jabatan : Kepala BPKP
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan dan akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2014

Pihak Kedua,

Mardiasmo
NIP 19580510 198303 1 004

Pihak Pertama

Bonny Anang Dwiyanto
NIP 19600825 198703 1 001

PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Unit Eselon II
Tahun Anggaran

: Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
: 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1.1 Meningkatkan Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD	Outcome		
	1.1.1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan	%	95
	1.1.2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	%	100
	1.1.3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar	%	85
	1.1.4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat	%	90
	1.1.5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat	%	70
	1.1.6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan <i>stakeholders</i> yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh <i>stakeholders</i>	%	95
	Output		
	1.1.1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perencanaan	Laporan	2
	1.1.1.2 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsooskam	Laporan	17
	1.1.2.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKPP	Laporan	4
	1.1.3.1 Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN	Laporan	61
	1.1.4.1 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perencanaan	Laporan	1
	1.1.4.2 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsooskam	Laporan	10
	1.1.4.3 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah	Laporan	8
	1.1.4.4 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Akuntan Negara	Laporan	1
	1.1.5.1 Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Perencanaan	Laporan	1
	1.1.5.2 Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Polsooskam	Laporan	19
	1.1.5.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah	Laporan	2
	1.1.6.2 Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsooskam	Laporan	8
1.2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%	Outcome		
	1.2.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/ daerah yang ditindaklanjuti	%	87,5
	1.2.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat	%	87
	Output		
	1.2.1.1 Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsooskam	Laporan	1
	1.2.2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perencanaan	Laporan	3
1.2.1 Terselenggaranya SPN/ pada 300 IPPD dan 2.1 terselenggaranya CG pada 75% BUMN/ BUMD	Outcome		
	2.1.1 Persentase IPPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal	%	100
	2.1.2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCCG/ KPI	%	75
	2.1.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja	%	1
	Output		
	2.1.1.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik	Laporan	2
	2.1.2.1 Laporan Hasil Bimtek/ Asistensi GCCG/ KPI Sektor Korporat	Laporan	60
	2.1.3.1 Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD	Laporan	2

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA OUTPUT		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
3.1 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BLUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%	Outcome				
	3.1.1	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.	Kel. Masy	1	
	3.1.2	IPP/IPPD/BUMN/BLUMD/BLU/BLUD berisiko <i>fraud</i> yang mendapatkan sosialisasi/DN/ asistensi/ evaluasi FCP	Instansi	4	
	3.1.3	Jumlah IPP/IPPD/BUMN/BLUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPPK	Instansi	1	
	3.1.4	Persentase pelaksanaan pengurusan HKP, klaim dan penyesuaian harga	%	85	
	3.1.5	Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA	%	85	
	3.1.6	Persentase TL hasil audit investigasi non IPPK oleh instansi berwenang	%	100	
	Output				
	3.1.1.1	Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi	Laporan	6	
	3.1.2.1	Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP	Laporan	4	
	3.1.3.1	Laporan Hasil Kajian Pengawasan	Laporan	1	
	3.1.4.1	Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga	Laporan	6	
	3.1.5.1	Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik	Laporan	58	
	3.1.6.1	Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya	Laporan	5	
	3.1.6.2	Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat	Laporan	2	
4.1 Meningkatkan Kualitas Penerapan SPPP di K/L, Pemda Sebesar 70%	Outcome				
4.1.1	Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPPP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008	%	100		
4.1.2	Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPPP Sesuai PP No 60 Tahun 2008	Pemda	1		
4.1.3	Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern	Pemda	1		
Output					
4.1.2.1	Jumlah Peserta Diklat SPPP	Orang	30		
4.1.2.2	Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPPP	Pemda	3		
4.1.1.1	Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPPP Bidang Polsosekam	Laporan	2		
	Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPPP Bidang Keuangan Daerah	Laporan	15		



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
5.2 Meningkatkan efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%.	Outcome		
	5.2.1	Persentase jumlah rencana penggunaan pengawasan yang terlaksana	% 90
	5.2.2	Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP	% 100
	5.2.3	Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian	Skala Likert 1-10 8
	5.2.4	Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA	100
	5.2.5	Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur	Skala Likert 1-10 7,5
	5.2.6	Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas	% 25
	5.2.7	Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa	Kali 100
	5.2.8	Persentase Pemanfaatan asset	% 100
	5.2.9	Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras	Skala Likert 1-10 8
	5.2.10	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektoral	% 95
	5.2.11	Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas	Topik Instansi
5.2.12	Jumlah Instansi ATPP yang telah disosialisasi dan atau di-assesment tata kelola ATPP Output	1	
5.2.1.1	Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	60
5.2.8.1	Jumlah Sarana Prasarana	Unit/M2 /Paket /Penda	37 / - / -
5.2.12.1	Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola ATPP Daerah	Laporan	1
5.2.12.2	Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola ATPP Daerah	Laporan	1
Jumlah Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPPP		Rp	3.862.099.000,00
Jumlah Anggaran Kegiatan Fasilitasi Dukungan Manajemen		Rp	25.861.582.000,00
Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana		Rp	205.850.000,00
Total Anggaran		Rp	29.929.531.000,00